

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Desentralisasi merupakan pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada menejer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi. Pada sistem pemerintah yang desentralisasi diwujudkan dengan sistem otonomi daerah yang memberikan sebagian wewenang yang tadinya harus diputuskan pada pemerintah pusat kini dapat diputuskan di tingkat pemerintah daerah. Kelebihan sistem ini adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di pusat. Namun kekurangan dari sistem desentralisasi pada otonomi khusus untuk daerah adalah euforia yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya mementingkan kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk di kontrol oleh pemerintah di tingkat pusat.

Peranan pemerintah dalam bidang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan langsung atau tidak langsung salah satu bentuk peranan pemerintah secara langsung adalah dengan intervensi anggaran melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dapat dilakukan dengan kebijakan perpajakan, kebijakan bukan pajak, kebijakan anggaran belanja negara maupun kebijakan pembiayaan anggaran termasuk transfer. Sedangkan peran pemerintah secara tidak langsung dapat di tempuh melalui berbagai regulasi atau peraturan pemerintah.

Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia yang di mulai dari tahun 2001 merupakan sebuah gebrakan (*big bag*) dari semula pemerintah yang bersifat sentralisasi menjasi pemerintah desentralisasi. Desentralisasi sesungguhnya merupakan alat atau instrumen yang dapat digunakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ditandai dengan proses pengalihan sumber keungan bagi daerah dalam jumlah yang sangat signifikan. Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia diwujudkan dalam bentuk pemberian transfer kepada daerah berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus dan penyesuaian, serta dalam bentuk instrumen peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh pengaturan perimbangan keuagan pusat dan daerah tercermin melalau pemberian kewenangan untuk pemanfaatan sumber pendanaan yang ada, kerjasama pengelolaan sumber daya alam di wilayah Aceh diikuti dengan pengelolaan sumber keuangan secara transparan dan akutanbel dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh dilakukan pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan pengetasan kemiskinan, dan kemajuaan kualitas pendidikan, pemanfaatan dana otonomi daerah khusus yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pertumbuhan ekonomi nasional.

Desentralisasi merupakan sebuah instrumen untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Dengan desentralisasi, akan diwujudkan dalam pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (*taxing power*), terbentuknya Dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala Daerah yang dipilih oleh rakyat, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari Pemerintah Pusat.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam peranan perempuan dalam ekonomi keluarga dalam suatu penelitian dengan judul ***“Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Kabupaten Aceh Selatan”***

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah seberapa besar pengaruh derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Selatan selama periode 1995-2012?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui berapa besar seberapa besar pengaruh derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Selatan selama periode 1995-2012?

1.4. Manfaat Penelitian

Laporan dan analisis atas penelitian ini memiliki dua manfaat sekaligus, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1.4.1. Manfaat Teoritis

a. Manfaat Bagi Penulis

Memberikan manfaat bagi peneliti dalam setiap aspek yang dikaji baik secara umum maupun khusus, dan secara teoritis laporan dan analisis atas penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan pengetahuan serta menambah wawasan penulis/peneliti terutama tentang pertumbuhan ekonomi.

b. Manfaat Bagi Lingkungan Akademik

Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai catatan potensial untuk dapat dijadikan rujukan dalam pemetaan arah pembangunan ekonomi terhadap kaum perempuan. disamping diharapkan agar kajian dan analisis atas penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi alternatif bagi mahasiswa di lingkungan Fakultas Ekonomi atau fakultas lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

1.4.2. Manfaat Praktis

Mengambarkan tentang manfaat praktis bagi pihak luar atau Pemerintah setempat (Pemerintah kabupaten Aceh Selatan) dan para pengambil kebijakan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan.

1.5. Sistematika Pembahasan

Untuk penjelasan atas topik penelitian ini, peneliti membagi pembahasannya menjadi tiga bagian yang terdiri :

Bagian pertama akan diawali dengan pendahuluan yang mencakup: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bagian Kedua adalah Tinjauan Pustaka yang membahas tentang Pengertian Desentralisasi dan Desentralisasi Fiskal, Konsep Desentralisasi, Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Perekonomian Daerah, Sejarah Desentralisasi Fiskal, Pengertian Pertumbuhan Ekonomi, Teori Pertumbuhan Wilayah, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi, Pengertian Pendapatan Asli Daerah, Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah, Undang-Undang Pendapatan Asli Daerah, Peranan Pemerintah, Pengeluaran Pemerintah, Perumusan Hipotesis.

Bagian Ketiga akan dibahas tentang Metode Penelitian yang mencakup Populasi dan Sampel, Data Penelitian diantaranya Jenis dan Sumber data, Teknik Pengumpulan Data, Model Analisis Data, Defenisi Operasional Variabel dan Pengujian Hipotesis.

Bagian keempat adalah Hasil dan Pembahasan yang Terdiri dari Statistik Deskriptif Variabel Penelitian, Derajat Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Aseh Selatan, Hasil Pengujian Hipotesis, dan Hasil Pembahasan.

Bagian kelima adalah Kesimpulan dan Saran.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Desentralisasi dan Desentralisasi Fiskal

Menurut Siddik (2002) Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom (untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan) dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi Fiskal adalah penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah.

Desentralisasi merupakan pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi. Pada sistem pemerintahan yang desentralisasi diwujudkan dengan sistem otonomi daerah yang memberikan sebagian wewenang yang tadinya harus diputuskan pada pemerintah pusat kini dapat diputuskan di tingkat pemerintahan daerah. Kelebihan sistem ini adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di pusat. Namun kekurangan dari sistem desentralisasi pada otonomi khusus untuk daerah adalah euforia yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya mementingkan kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat.

2.1.1. Konsep Desentralisasi

Menurut Siddik (2002) Desentralisasi merupakan sebuah instrumen untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Dengan desentralisasi, akan diwujudkan dalam pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (*taxing power*), terbentuknya Dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala Daerah yang dipilih oleh DPRD, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari Pemerintah Pusat. secara umum,

Konsep desentralisasi terdiri atas :

1. Desentralisasi Politik (*Political Decentralization*);
2. Deentralisasi Administratif (*Administrative Decentralization*);
3. Desentralisasi Fiskal (*Fiscal Decentralization*); dan
4. Desentralisasi Ekonomi (*Economic or Market Decentralization*).

Manfaat desentralisasi fiskal adalah:

Anggaran daerah untuk pelayanan publik bisa lebih mudah disesuaikan dengan preferensi masyarakat setempat dengan tingkat akuntabilitas dan kemauan bayar yang tinggi dan Peluang meningkatkan penerimaan pajak dari pajak daerah. Pemerintah daerah bisa menarik pajak dengan basis konsumsi dan aset yang tidak bisa ditarik oleh pemerintah Pusat.

Sedangkan kelemahannya adalah:

- a. Lemahnya kontrol pemerintah pusat terhadap ekonomi makro.

- b. Sulitnya menerapkan kebijakan stabilitas ekonomi.
- c. Sulitnya menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi dengan pemerataan.
- d. Besarnya biaya yang harus ditanggung pemerintah daerah dari pada keuntungan yang didapat.

2.1.2. Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Perekonomian Daerah

Secara nasional (*agregat*), transfer per kapita yang meningkat sangat tajam dari tahun ke tahun selaras dengan pengurangan tingkat kemiskinan dan pengurangan tingkat pengangguran ada beberapa daerah yang tingkat transfer per kapitanya sangat tinggi, mengalami penurunan kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan daerah lainya Desentralisasi fiskal telah secara nyata memberikan dampak *catching-up* bagi daerah-daerah yang sebelumnya sangat tertinggal untuk mengejar ketertinggalannya.

Telah terjadi peningkatan output layanan publik di daerah: Output pendidikan (Angka Partisipasi Murni/APM Sekolah Dasar) yang meningkat di seluruh provinsi. Output kesehatan (Angka Kematian Bayi/IMR) yang menurun

Manfaat Penerapan Desentralisasi Fiskal di Indonesia

- a. Desentralisasi akan lebih mampu menyukseskan tujuan-tujuan pembangunan lewat pemberian hak kontrol kepada masyarakat yang memiliki informasi dan insentif untuk membuat keputusan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
- b. Pemberian tanggung jawab dan kewenangan yang lebih kepada daerah dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi dari layanan publik. (Sukirno 2004, h, 235)

2.1.3. Sejarah Desentralisasi Fiskal

Sentralisasi ataupun desentralisasi sebagai suatu sistem administrasi pemerintah, dalam banyak hal tidak dapat di lepaskan dari proses pertumbuhan suatu negara, sejarah mencatat desentralisasi di Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan perubahan konstelasi politik yang melekat dan terjadi pada perjalanan kehidupan bangsa. Pada pra kemerdekaan , Indonesia di jajah Belanda dan Jepang. Penjajah telah menerapkan desentralisasi yang bersifat sentralistis, birokratis, dan feodalistis untuk kepentingan mereka. Sejak pemerintahan Republik Indonesia, beberapa undang – undang tentang pemerintahan daerah telah ditetapkan dan berlaku silih berganti, ini di maksud untuk mencari bentuk dan susunan pemerintah yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang lebih cocok dan memenuhi harapan serta sesuai dengan tuntunan pembangunan (Kuncoro 2004, h. 4).

2.2. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah ekonomi makroekonomi dalam jangka panjang dari Satu periode ke periode yang lainnya, kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitas (Sukirno 2004, h.9).

Menurut Kuznets dalam Jhingan 2007, h,57 mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya,

kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Defenisi ini memiliki tiga komponen: *pertama*, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus menerus persediaan barang. *Kedua*, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk. *Ketiga*, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian dibidang kelembagaan dan ideology sehingga inovasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara tepat (Jhingan 2007, h. 57).

Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangasn fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku disuatu negara, seperti penambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan sektor jasa dan penambahan produksi barang modal. Tetapi dengan menggunakan berbagai jenis data produksi adalah sangat sukar untuk memberi gambaran dasar mengenai pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara, ukuran yang selalu digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil (Sukirno 2006, h. 423).

2.2.1 Teori Pertumbuhan

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses yang mencerminkan aspek dinamis dari suatu perekonomian yang menggambarkan bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Dalam ilmu ekonomi terdapat beberapa teori pertumbuhan dimana para ekonom mempunyai pandangan yang berbeda tentang proses pertumbuhan suatu ekonomi. Teori-teori pertumbuhan ekonomi dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok teori yaitu:

teori pertumbuhan klasik, teori pertumbuhan neo-klasik dan teori pertumbuhan ekonomi modern. (Sukirno 2006, h. 268).

a. Teori Pertumbuhan Klasik

Menurut pandangan ahli-ahli klasik ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu:

1. Jumlah penduduk
2. Jumlah stok barang-barang modal
3. Luas tanah dan kelayakan alam (Sukirno 2006, h. 268).

Menurut teori Schumpeter dalam Sukirno menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha didalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Artinya para pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Ada beberapa inovasi yang dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah inovasi tersebut meliputi:

1. memperkenalkan barang-barang baru
2. mempertinggi efesien cara memproduksi dalam menghasilkan sesuatu barang.
3. memperluas pasar sesuatu barang kepasar-pasaran yang baru (Sukirno 2004, h. 434).

Menganalisis mengenai masalah pertumbuhan ekonomi, teori Harrod-Domar bertujuan menggunakan permisalan-permisalan berikut:

1. Barang modal telah mencapai kapasitas penuh
2. Rasio modal produksi (Capital Output rasio) tetap nilanya (Sukirno 2004, h.435)

b. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Teori pertumbuhan Neo klasik melihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari segi penawaran. Menurut teori ini yang dikembangkan oleh Abramovits dan Solow, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan faktor-faktor produksi. Faktor terpenting yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukan hanya penambahan modal dan penambahan tenaga kerja. Faktor yang paling penting adalah kemajuan teknologi dan penambahan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja.

Teori pertumbuhan neoklasik dikembangkan oleh Robert M. Solow (1970) dari Amerika Serikat dan T.W Swam (1956) dari Australia model Solow Swam menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi, dan besarnya output yang saling beriteraksi. Perbedaan utama dengan model Horrod-Domar dimasukkannya unsur kemajuan teknologi dalam modelnya, selain itu, Solow-Swam menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi antara kapital dan tenaga kerja. Dengan demikian, syarat-syarat adanya pertumbuhan yang mantap dalam model Solow-Swam kurang restriktif di sebabkan kemungkinan substitusi antara modal dan tenaga kerja (Tarigan 2007, h. 52)

c. Teori Pertumbuhan Ekonomi Modern

Teori ini adalah meliputi teori pertumbuhan Rostow dan Kuznet. Menurut Rostow pembangunan ekonomi adalah suatu transformasi dari suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern melalui tahapan sebagai berikut:

1. Tahap masyarakat tradisional (*the traditional society*)

Perekonomiaan masyarakat yang belum berkembang sehingga mereka belum mengenal alat-alat canggih, pada tahap ini mereka masih menggunakan alat-

alat tradisional, baik disektor pertanian sampai cara memproduksi suatu barang yang masih *primitif* dengan membutuhkan waktu yang lama.

2. Tahap Prasyarat tinggal landas (*the preconditional for take-off*)

Tahap ini masyarakat sedang melakukan perubahan untuk mencapai pertumbuhan atas kekuatan sendiri sehingga masyarakat dapat memperoleh tujuan-tujuan yang diinginkan.

3. Tahap tinggal landas (*the take-off*)

Tahap ini disuatu negara pertumbuhan ekonomi selalu terjadi, seperti halnya terjadi kemajuan pesat dalam inovasi atau terbukanya pasar-pasar baru.

4. Tahap menuju kedewasaan (*the drive to maturity*)

Tahap ini situasi masyarakat sudah menuju kedewasaan atau kematangan, artinya masyarakat sudah mulai berpikir dan mulai mengenal teknologi modern, sehingga hampir semua faktor mereka menggunakan teknologi baik disektor produksi maupun kekayaan alam lainnya.

5. Masyarakat berkonsumsi tinggi (*the age of high mass consumption*)

Tahap ini mereka lebih mementingkan perhatian kepada masyarakat, karena pada tahap ini mereka lebih menekankan masalah konsumsi dan kesejahteraan masyarakat, tetapi tidak mementingkan ke masalah produksi. Kuznet mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kemajuan jangka panjang untuk menyediakan berbagai jenis barang ekonomi yang terus meningkat kepada masyarakat. Kemampuan ini tumbuh atas dasar kemajuan teknologi, institusional dan ideologi yang diperlukannya (Sukirno 2006, h 169).

Berikut ini ada beberapa teori pertumbuhan ekonomi wilayah (regional) yang populer yaitu:

1. Model Neo Klasik

Penekanan analisisnya adalah pada fungsi produksi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, perpindahan penduduk (migrasi) dan mobilitas modal antar wilayah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional.

2. Cumulative Causational Models

Dixon dan Thirwall yang menyatakan bahwa setiap negara akan terjadi *verdoorn effect*, artinya daerah maju akan berkembang pesat, karena adanya hubungan positif antara keunggulan teknologi dengan keuntungan perusahaan.

3. Core Periphery Models

Adanya hubungan antara daerah inti dengan daerah pinggiran yang dinamakan *spatial interaction*.

4. Model Pertumbuhan Interregional

Model ini adalah perluasan dari teori basis ekspor, yaitu dengan faktor-faktor yang bersifat eksogen, selain itu. Model basis ekspor hanya membahas daerah itu sendiri tanpa memperhatikan dampak dari daerah tetangga. Model ini memasukkan dampak dari daerah tetangga, itu sebabnya maka dinamakan model interregional. Dalam model ini diasumsikan bahwa selain ekspor pengeluaran pemerintah dan investasi juga bersifat eksogen dan daerah itu terikat kepada suatu sistem yang terdiri dari beberapa daerah yang berhubungan erat.

Berdasarkan keempat teori model pertumbuhan regional tersebut yang mempunyai hasil kesimpulan yang berbeda, tetapi dalam hal untuk mewujudkan pertumbuhan yang baik, tidak boleh hanya menggunakan salah satu model saja, tetapi harus menggunakan keempat model, sehingga permasalahan dapat diatasi

dan faktor pertumbuhan menjadi lebih lengkap sesuai dengan potensi dan permasalahan yang terdapat pada daerah yang bersangkutan (Hastari 2009, h. 19).

2.2.2. Teori Pertumbuhan Wilayah

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah penambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*Added Value*) yang terjadi. Perhitungan pendapatan wilayah pada awalnya dibuat dalam harga berlaku. Namun agar dapat melihat pertumbuhan dari satu kurun waktu ke waktu berikutnya, harusnya dinyatakan dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam nilai konstan. Biasanya BPS dalam menerbitkan laporan pendapatan regional tersedia angka dalam harga berlaku dan harga konstan. Pendapatan wilayah menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi), yang berarti secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah juga oleh seberapa besar terjadi *Transfer Payment*, yaitu bagian pendapatan yang mengalir keluar wilayah atau pendapatan aliran dana dari luar wilayah.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Jadi, persentase pertumbuhan output itu harus lebih tinggi dari persentase pertumbuhan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan terlanjut (Tarigan 2007, h. 46).

2.2.3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor yaitu:

a. Faktor Ekonomi

1. Tanah dan kekayaan alam lainnya

Sumber daya alam merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Di negara berkembang, sumber daya alam sering kali kita lihat terbengkalai karena kurang atau salah pemanfaatan. Apabila sumber daya alam tidak dimanfaatkan dengan baik, maka suatu negara tidak akan mungkin mengalami kemajuan.

2. Akumulasi modal

Modal dapat diartikan sebagai persediaan faktor produksi secara fisik dapat diproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu maka dapat disebut akumulasi modal atau perbebentukan modal. Proses pembentukan modal akan menaikkan output nasional. Investasi dibidang modal tidak hanya menaikkan produksi tetapi juga menaikkan kesempatan kerja.

3. Organisasi

Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam kegiatan ekonomi yang bersifat komplemen bagi modal dan menaikkan produktifitas.

4. Teknologi

Teknologi sangat penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Karena adanya teknologi dapat menciptakan metode produksi yang baru. Pertumbuhan teknologi yang baik dapat meningkatkan produktivitas kerja, modal dan faktor produksi lainnya, sehingga dapat menciptakan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

5. Pembagian kerja dan skala produksi

Spesialisasi dan pembagian kerja akan meningkatkan produktivitas, artinya hal ini akan dapat menggiring perekonomian kearah ekonomi yang produksinya berskala besar, sehingga dapat membantu perkembangan industri. Hal ini dapat dipengaruhi oleh besar kecilnya tingkat permintaan, banyak atau tidaknya tingkat produksi serta tersedianya sarana transportasi. Apabila skala produksi besar maka dapat meningkat dengan sendirinya dan pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami peningkatan.

b. Faktor Non Ekonomi

faktor non ekonomi merupakan faktor yang terdiri dari faktor sosial, manusia dan politik. Faktor sosial dapat mempengaruhi perekonomian, budaya yang sudah mengalami kemajuan akan termotifasi untuk mencari tambahan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat sehingga akan mendorong manusia untuk mencari tambahan pendapatan. Seperti yang dikemukakan oleh Nurkse dalam Sukirnobahwa pembangunan ekonomi berkaitan dengan para manusia, pandangan masyarakat, kondisi politik dan latar belakang historis suatu negara. Kondisi politik disuatu negara sangat mempengaruhi perekonomian dinegara itu sendiri, jika suatu negara mengalami kondisi krisis politik, maka secara otomatis pertumbuhan ekonomi akan terganggu dan pertumbuhan ekonomi tidak akan meningkat serta bisa mengalami penurunan. (Sukirno 2006, h. 170).

2.3. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Salah satu pendapatan daerah adalah berasal dari pendapatan asli daerah, dana-dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut merupakan salah satu faktor penunjang dalam melakukan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin serta biaya pembangunan daerah. PAD juga merupakan sebagai alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah. Serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakai jasa tersebut. Tentu dalam hal ini tidak lepas dari adanya badan yang menaungi atau yang diberi tugas untuk mengatur hal tersebut (Hidayat 2009, h. 21).

Pendapatan Daerah yang dijelaskan dalam Undang-Undang No.33 tahun 2004 pasal 1 adalah hak Pemerintah Pusat dan Daerah pasal 6 bahwa sumber PAD adalah sebagai berikut:

a) Pendapatan Asli Daerah Sendiri yang Sah :

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil Perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan
4. zakat
5. lainnya pendapatan daerah yang sah.

b) Pendapatan berasal dari pemberian pemerintah yang terdiri :

1. Sumbangan dari pemerintah
2. Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan
3. pendapatan lain-lain yang sah

2.4. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

Klasifikasi pendapatan daerah berdasarkan permendagri Nomor 26 tahun 2006 terdiri dari:

2.4.1. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Pasal 2 Tahun 2009 pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu (Hidayat 2009, h. 9):

1. sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*)
2. sebagai alat tukar (*regulator*)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Pasal 2 Tahun 2009 jenis pajakan provinsi terdiri dari :

- 1) pajak kendaraan bermotor (PKB)
- 2) bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB)
- 3) oajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB)
- 4) pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah
- 5) pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Pasal 2 tahun 2009 jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan

- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Disamping dari pajak daerah seperti yang disebutkan diatas, daerah juga diberikankeluasaan atau peluang untuk menciptakan pajak daerah lainnya asal sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam menciptakan pajak baru (Suparmoko 2002, h. 59) adalah:

- 1)Pungutan itu harus bersifat pajak, artinya dapat dipaksa dan balas jasanya tidak dapat langsung ditunjukkan
- 2)Objek pajak dan besar pajak yana baru tidak bertentangan dengan kepentingan umum, artinya untuk kepeletinagan bersama yang lebih luas antar pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan dan keamanan. Contohnya : pajak atas seluruh komoditi dan pajak atas minuman beralkohol.
- 3)Potensi pajak tersebut memadai artinya biaya pemungutannya tidak akan lebih besar dari pada penerimaan pajak.
- 4)Pajak baru itu tidak berdampak ekonomi negatif, artinya tidak menyebabkan alokasi faktor produksi yang salah dan dapat menghambat pembangunan.

- 5) Pajak dikenakan sedemikian rupa dengan memperhatikan aspek keadilan (*equity*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) si wajib pajak
- 6) Pajak yang dikenakan akan menjaga kelestarian lingkungan
- 7) Objek pajak terletak diwilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat diwilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan

Disamping kriteria pajak, didalam pajak daerah ada sistem penggunaan pajak yang terdiri dari 3 sistem antara lain yaitu:

- 1) pajak progresif
- 2) pajak proposional
- 3) pajak regresif

istilah Smith s Camnons Yaitu

1. prinsip kesamaan atau keadilan (*equity*)
2. prinsip kepastian (*certainfy*)
3. prinsip kecocokan atau kelayakan (*convenience*)
4. prinsip ekonomi (*economy*) (Pudyatmoko 2004, h. 23)

2.4.2. Retribusi Daerah

Retribusi merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar peranannya dalam menyumbang pada terbentuknya pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. (Adisasmita 2010, h. 115).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Pasal 108 Tahun 2009 retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin

tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Pasal 108 Tahun 2009 pengelompokan retribusi daerah adalah :

1) Retribusi Jasa Umum

a. Pelayanan Kesehatan

b. Pelayanan kebersihan dan persampahan

c. Pengantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil

d. Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat

e. Pelayanan Parkir ditepi jalan umum

f. Pelayanan pasar

g. Pelayanan air bersih

h. Pengujian kendaraan bermotor

i. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran

j. pengantian biaya cetak peta yang dibuat Pemerintah Daerah

k. Pengujian kapal perikanan

2). Retribusi Jasa Usaha

a. Pemakaian kekayaan daerah

b. Pasar grosir atau pertokoan

c. Pelayanan terminal

d. Pelayanan tempat khusus parkir

e. Pelayanan tempat penitipan anak

f. Penginapan/vila

g. Penyodotan kakus

- h. Rumah potong hewan
 - i. Tempat penyandaran kapal
 - j. Tempat rekreasi dan olah raga
 - k. Penyebrangan diatas air
 - l. Pengelolaan air limbah
 - m. Penjualan usaha produksi daerah
- 3) Retribusi Perizinan Terpadu
- a. Izin peruntukan penggunaan tanah
 - b. Izin mendirikan bangunan
 - c. Izin tempat penjualan minuman beralkohol
 - d. Izin gangguan
 - e. Izin trayek
 - f. izin pengambilan hasil hutan

Teori biaya retribusi di bagi kedalam dua kelompok yaitu:

1. Retribusi dibawah biaya

Konsep dasar untuk mengenakan retribusi biasanya menyarankan bahwa biaya retribusi didasarkan pada *total cost* dari pelayanan yang disediakan, namun, pengujian teoritis dari retribusi melibatkan beberapa kompromi. Hal ini mengakibatkan retribusi menjadi di bawah tingkat *full cost* dan subsidi dari penerimaan umum.

2. Retribusi diatas biaya

Dalam beberapa hal retribusi mungkin didasarkan pada *recovering* dari pada *full cost* dari suatu pelayanan, yaitu atas dasar mencari keuntungan. Retribusi diatas biaya dapat juga dalam situasi operasi khusus dimana suatu pelayanan yang

sama dikaitkan dengan penyediaan biaya. Retribusi diatas biaya ini analog dengan perpajakan, penerapannya dan pemerataannya harus dipertimbangkan. Bagian mana masyarakat yang membayar lebih dari satu pelayanan, dan bagai mana menerima keuntungan dari kelebihan keuntuntgan (Adisasmita 2010, h. 115-116).

2.4.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya Yang dipisahkan

Penerimaan PAD lainnya yang menduduki peranan penting setelah pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian pemerintah daerah atas laba BUMD. Tujuan didirikannya BUMD untuk menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah. BUMD merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat dan juga merupkan salah satu sumber pendapatan daerah. Jenis pendapatannya yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan derah lainnya yang dipisahkan. Antara lain Laba, Deviden dan Penjualan saham milik daerah (Hidayat 2009, h. 20).

Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan adalah hasi yang diperoleh Dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan anggaran pendapatan belanja darerah (APBD). Jika atas pengelolaan tersebut memperoleh laba, maka laba tersebut dapat dimasukan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari :

2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/badan usaha milik daerah (BUMD)
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/badan usaha milik pemerintah (BUMN)

4. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

2.4.4. Zakat

Zakat sebagai salah satu sumber PAD belum dikelola dengan baik. Hal ini disebabkan belum adanya qanun yang mengatur lebih lanjut tentang zakat sebagai sumber PAD seperti yang diatur dalam undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Sebagai tingkat kesadaran masyarakat sudah tinggi dalam hal membayar zakat. Kelahiran UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang didalamnya secara khusus disebutkan tentang zakat dan Baitul Mal. Hal ini merupakan suatu era baru yang menyebutkan bahwa zakat harus diatur oleh pemerintah daerah. Provinsi dan kabupaten /kota sebagai salah satu sumber PAD Aceh dan PAD kabupaten/kota yang harus disetor kepada Baitul Mal setempat serta penyalurannya ditetapkan berdasarkan Ansaf prioritas sesuai ketentuan Syariah (Abrar 2010, h. 84).

2.4.5. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Hasil usaha daerah yang sah adalah pendapatan asli daerah yang tidak termasuk kategori pajak, retribusi, dan perusahaan daerah (BUMN). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa Giro
3. Pendapatan Bunga
4. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lainnya sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah

5. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
6. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
7. Pendapatan denda pajak
8. Pendapatan denda retribusi
9. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
10. Pendapatan dari pengembalian
11. fasilitas sosial dan fasilitas umum
12. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan, pendapatan dari angsuran atau cicilan.

2.5. Undang –Undang Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia tentang pendapatan asli daerah No 33 pasal 7 tahun 2004 dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang :

- a. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, dan
- b. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor (Fokusmedia 2007, h. 250).

2.6. Peranan Pemerintah

Penyelenggaraan pemerintah di daerah merupakan manginvestasi dari pemerintah seluruh wilayah negara. Untuk itu segala aspek menyangkut konfigurasi kegiatan dan karakter yang berkembang, akan mewarnai penyelenggaraan pemerintah secara nasional. Peranan dan kedudukan pemerintah

daerah sangat strategis, dan sangat menentukan secara nasional, sehingga paradigma baru pemerintah yang berbasis daerah akan berimplikasi pada bergesernya tugas dan fungsi pemerintah pusat lebih banyak kearah penyelenggaraan fungsi pengarah dan mendelegasikan sebagian besar kegiatan di daerah dengan memberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya kepada daerah, sehingga persepsi lama yang sering didengar menyangkut egoisme sektoral akan terhapus. Provinsi yang kedudukannya sebagai daerah otonom dan sekaligus sebagai wilayah administrasi akan melaksanakan kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan kepada gubernur. (Kaloh 2002, h. 55).

2.7. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah salah satu instrumen kebijakan fiskal. Pengeluaran pemerintah merupakan seluruh pembelian atau pembayaran barang dan jasa untuk kepentingan nasional, seperti pembelian persenjataan dan alat-alat kantor pemerintah, pembangunan jalan dan bendungan, gaji pegawai negeri, angkatan bersenjata, dan lainnya. Pengeluaran pemerintah juga merupakan instrumen pengukur dimana pemerintah menentukan seberapa besar peranan sektor pemerintah dan sektor swasta. Disamping itu, pengeluaran pemerintah dapat menjadi penentu pokok jumlah pengeluaran agregat, dan juga penentu pertumbuhan GNP riil jangka pendek.

Ada beberapa tahapan yang dipenuhi pemerintah oleh negara pada tahap lanjut pembangunan, sehingga tidak perlu lagi terfokus pada penyediaan prasaranan layaknya negara pada tahap awal perkembangan. Secara ringkas teori pengeluaran negara menguraikan tiga tahapan yang pasti dilalui setiap negara. pada awal perkembangan ekonomi, diperlukan pengeluaran pemerintah yang besar untuk

investasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur seperti sarana jalan, kesehatan, dan pendidikan. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, namun diharapkan investasi sektor swasta sudah mulai berkembang. Kemudian pada tahap lanjut pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya peningkatan pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial.

Menurut Davide dan Ricardo (2009) dalam (Wahyuningtyas 2010, h.38-39), yang di kemukakan oleh Adolph Wagner, menurut Wagner, terdapat 5 (lima) hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat, yaitu:

1. Tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan
2. Kenaikan tingkat pendapatan masyarakat
3. Urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi
4. Perkembangan demokrasi
5. Ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintah

2.8. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan latar belakang penelitian dapat di rumuskan hipotesisnya sebagai berikut, diduga bahwa derajat desentralisasi fiskal berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Selatan.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah meliputi PAD, TPD, PDRB, PE untuk Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Kabupaten Aceh Selatan dari tahun 1995-2012

3.2. Data Penelitian

3.2.1. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, untuk keperluan analisis maka dalam penelitian di gunakan data sekunder . Data sekunder diperoleh dari instansi pemerintah yang terkait dengan penelitian ini seperti: BAPPEDA Aceh Selatan, dan DPKKD Aceh Selatan serta data-data yang di publikasikan melalui tulisan ilmiah dan literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan penulisan ini, data tersebut selanjutnya di analisis dengan melakukan pendekatan metode kuantitatif penyajian dan penyusunan data kedalam tabel-tabel untuk dianalisa.

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Studi Pustaka
2. Penelitian Lapangan

3.3. Model Analisis Data

3.3.1 Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal

Mengikuti Jin dan Zou (2002) dan Slinko (2002) dalam Siagian (2010, h. 63) pengukuran derajat desentralisasi fiskal dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penerimaan, yaitu mengukur derajat desentralisasi fiskal dari *share* pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah yaitu :

$$DFit = \frac{PADit}{TPDit} \times 100 \% \dots\dots\dots(1)$$

Dimana :

DFit : derajat desentralisasi fiskal kabupaten/kota i, pada tahun t

PADit : pendapatan asli daerah kabupaten/kota i, pada tahun t

TPDit : total pendapatan daerah kabupaten/kota i, pada tahun t

Semakin besar nilai DF, menunjukkan semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal di wilayah tersebut, begitu juga sebaliknya. Satuan dari variabel derajat desentralisasi fiskal adalah persen.

3.3.2. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis ini digunakan sebagai alat peramalan nilai pengaruh suatu variabel bebas (x) terhadap variabel terikat (y) dengan rumus sebagai berikut (Gurajati 2003, h. 26):

$$Y = a + bX + e \dots\dots\dots(2)$$

Dimana :

Y = Pertumbuhan Ekonomi

a = Nilai Konstan (*Intercept*)

b = *Slope* (Koefisiensi Regresi)

X = Jumlah Desentralisasi Fiskal

e = Faktor pengganggu (*disturban centrem*)

3.3.3. Analisis Korelasi (r)

Analisa koefisien korelasi adalah suatu analisa untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Korelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Analisis koefisien korelasi sederhana

Dalam regresi sederhana, adaah teknik yang di gunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau korelasi antara dua variabel. jika angka koefisien determinasi tersebut diakarkan maka akan didapatkan koefisien korelasi (r) yang merupakan ukuran hubungan linier antara dua variabel y dan x adapun formula perhitungannya adalah sebagai berikut (Nacrowi 2006, h. 133):

$$r = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i) (\sum Y_i)}{\sqrt{[n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2][n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2]}} \dots\dots\dots (3)$$

Dimana:

r = Koefesiensi Kolerasi

n = Jumlah Tahun

Y =Pertumbuhan Ekonomi

X= Jumlah Desentralisasi Fiskal

b. Koefisien Determinasi (r²)

Analisa ini digunakan untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan variabel bebas (X) terhadap variabl terikat (Y). Koefisien determinasi (r²) merupakan kuadrat dari nilai koefisien kolerasi. Rumus koefisien determinasi adalah sebagai berikut (Hasan 2002, h. 236).

$$KP = r^2 \times 100\% \dots \dots \dots (4)$$

Dimana:

Kp = Besar Koefisien penentu (determinasi)

r = Koefisien Kolerasi

c. Uji t

Uji signifikan parameter individual (uji t) dilakukan untuk melihat signifikan dari pengaruh variabel bebas (desentralisasi fiskal) terhadap variabel terikat (pertumbuhan ekonomi) secara individual dengan rumus sebagai berikut (Hasan 2002, h. 2241) :

$$t = \frac{t \ n - r^2}{n - r^2} \dots \dots \dots (5)$$

Dimana:

n= Jumlah Tahun

r= Koefisien Kolerasi

3.4. Definisi Operasi Variabel

Dalam penelitian ini didefenisi operasional variabel yang digunakan dalam analisis ini adalah :

- a. Derajat Desentralisasi fiskal (X) adalah dana yang di berikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah agar dapat di kelola dengan baik hasil pendapatan daerah di Kabupaten Aceh Selatan. Dalam kurun waktu 1995-2012 di Kabupaten Aceh Selatan.
- b. Pertumbuhan Ekonomi (Y) adalah laju pertumbuhan ekonomi pada kurun Waktu 1995-2012 di Kabupaten Aceh Selatan yang di ukur dalam persen.

3.5. Pengujian Hipotesis

Hipotesa statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. H_0 ; $\beta = 0$, variabel desentralisasi fiskal yang diteliti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Selatan
- b. H_1 ; $\beta \neq 0$, variabel desentralisasi fiskal yang diteliti berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Selatan.

Kriteria uji hipotesis yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah:

- a. apa bila t_{hitung} lebih besar dari pada t_{tabel} ($t_{hitung} > t_{tabel}$), maka H_0 ditolak H_1 diterima, artinya variabel derajat desentralisasi fiskal yang diteliti berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Selatan
- b. apa bila t_{hitung} lebih besar dari pada t_{tabel} ($t_{hitung} < t_{tabel}$), maka H_0 diterima H_1 ditolak, artinya variabel derajat desentralisasi fiskal yang diteliti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Selatan

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis ini, Peneliti sajikan untuk memperlihatkan Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Kabupaten Aceh Selatan, hal ini dapat memberikan gambaran untuk mengambil kebijakan yang harus diambil oleh para pemerintah agar tepat sasaran dan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal di Kabupaten Aceh Selatan. Serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Selatan.

4.2. Derajat Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Aceh Selatan

Perkembangan Desentralisasi Fiskal yang di ukur dari rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah dapat di lihat pada Tabel berikut :

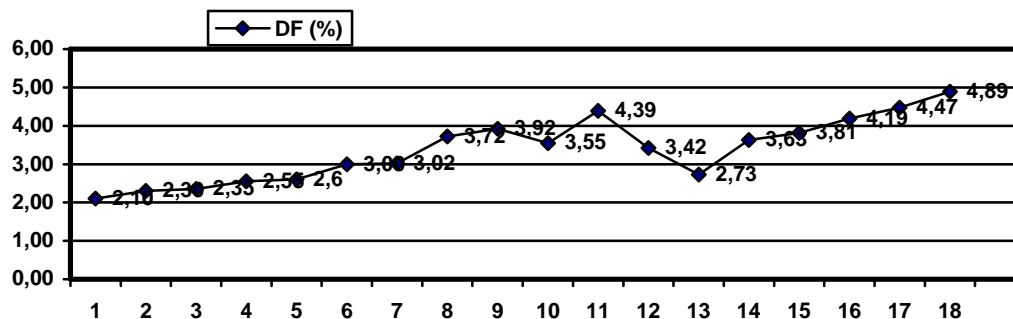
Tabel 1
Derajat Desentralisasi Fiskal di Kabupataen Aceh Selatan
Tahun 1995-2012

No	Tahun	PAD (Rupiah)	TPD (Rupiah)	DF (Persen)
1.	1995	2.676.908.965	221.844.572.025	1,21
2.	1996	2.895.789.479	245.893.369.693	1,18
3.	1997	2.915.275.901	256.355.123.433	1,14
4.	1998	2.983.110.718	264.852.327.377	1,13
5.	1999	3.726.987.957	289.357.128.327	1,29
6.	2000	3.972.562.337	295.357.681.913	1,35
7.	2001	4.229.622.885	259.520.481.511	1.63
8.	2002	5.328.244.215	281.510.900.212	1.89
9.	2003	6.329.682.886	318.263.623.492	1.99
10.	2004	5.832.431.311	351.623.725.492	1.66
11.	2005	5.021.948.817	223.605.077.400	2.24
12.	2006	9.978.254.999	379.771.556.409	2.63
13.	2007	13.327.987.773	429.931.769.661	2.70
14.	2008	15.000.000.000	431.051.127.900	3.48
15.	2009	19.391.232.990	438.587.749.411	4.42
16.	2010	23.280.488.630	482.228.344.058	4.83
17.	2011	35.061.950.187	574.572.890.344	6.10
18.	2012	30.000.000.000	692.988.629.530	4.33

Sumber: DPKKD Aceh Selatan (Data diolah tahun 2013)

. Berdasarkan dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa derajat desentralisasi fiskal (DF) yang dicapai oleh kabupaten Aceh Selatan mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Seperti yang terlihat pada tabel 1 diatas Tahun 1995 - 2004 DF berkisar 1,21-1,99 persen, pada kurun waktu diatas DF mengalami kenaikan dan penurunan, di tahun 2005 - 2007 DF berkisar sebesar 2,24 – 2,70 persen dan di tahun selanjutnya tahun 2008 DF mengalami lagi kenaikan sebesar 3.48 persen dan tahun 2009 DF nya mengalami kenaikan lagi sebesar 4.42 persen dan tahun 2010-2011 DF mengalami kenaikan sebesar 4.83-6.10 persen di tahun 2012 mengalami sedikit penurunan sebesar 4.33 persen.

Gambar 1
Tingkat Laju Pertumbuhan Ekonomi
di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 1995-2012



Sumber: Hasil penelitian (Data diolah tahun 2013)

4.3 Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Aceh Selatan

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Selatan selama Kurun Waktu 1995-2012 menunjukkan perkembangan yang lebih baik, seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 2
 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Aceh Selatan
 Tahun 1995-2012

No	Tahun	PDRB (Jutaan Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)
1.	1995	1.513.656.80	2.10
2.	1996	1.643.705.50	2.30
3.	1997	1.762.987.59	2.35
4.	1998	1.983.011.71	2.55
5.	1999	1.217.275.90	2.60
6.	2000	1.415.381.44	3.00
7.	2001	1.092.287,92	3.02
8.	2002	1.129.691,39	3.72
9.	2003	1.112.779,53	3.92
10.	2004	1.319.836,13	3.55
11.	2005	1.513.656,80	4.39
12.	2006	1.643.705,50	3.42
13.	2007	1.762.987,59	2.73
14.	2008	1.983.011,71	3.63
15.	2009	2.217.275,90	3.81
16.	2010	2.415.381,44	4.19
17.	2011	2.709.900,06	4.47
18.	2012	2.112.831,08	4.89

Sumber: BAPPEDA Aceh Selatan (Data diolah tahun 2013)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Selatan. Dalam kurun waktu 1995-2012 Kabupaten Aceh Selatan mengalami pertumbuhan ekonomi secara fluktuasi pada setiap tahunnya. Pada tahun 1995-1999 laju pertumbuhan ekonomi berkisar 2,10-2,60 persen tahun 2000 - 2004 laju pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan menjadi 3,00-3,55 pada tahun 2005 perekonomian Aceh Selatan tumbuh 4,39 persen, laju perekonomian Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2006 mengalami penurunan yang relatif kecil yakni, 3,42 persen, tahun 2007 mengalami pertumbuhannya kembali melambat menjadi 2,73 persen, hal ini disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan sektor pertanian sebesar minus 1,48 persen, dimana sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalm pembentukkan PDRB kabupaten Aceh Selatan. Tahun 2008 laju pertumbuhan perekonomian Aceh Selatan mengalami peningkatan menjadi 3,63 persen. Tahun 2009 dan 2010 pertumbuhan ekonomi Aceh Selatan mengalami peningkatan kembali masing-masing 3,81 persen dan 4,19 persen. Kemudian di tahun 2011 dan 2012 terjadi peningkatan pertumbuhan menjadi 4,47 persen dan 4,89 persen.

Data tersebut mendeskripsikan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Selatan selama dua belas tahun terakhir tingkat laju pertumbuhan ekonominya cenderung naik turun.

4.4. Hasil Pengujian Hipotesis

Untuk mengetahui pengaruh derajat desentralisasi pasca otonomi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Selatan akan dianalisis dengan menggunakan model regresi linear sederhana.

Tabel 3
Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 1995-2012

No	Variabel	Mean	Std.Deviation	N
1.	Pertumbuhan Ekonomi (y)	3.3689	.82913	18
2.	Desentralisasi Fiskal (x)	2.6417	1.50058	18

Sumber: Data Penelitian (Data diolah tahun 2013)

Pada tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa rata-rata variabel derajat desentralisasi fiskal (X) selama kurun waktu 18 tahun 1995-2012 adalah sebesar 2.6417 dengan standar deviasi 1.50058, ini diakibatkan derajat desentralisasi fiskal di Kabupaten Aceh Selatan terus mengalami peningkatan. Hal ini membuktikan bahwa tingkat derajat desentralisasi fiskal di kabupaten Aceh Selatan yang diukur dari *Share* penerimaan asli daerah terhadap total pendapatan daerah setiap tahunnya menunjukkan peningkatan yang cukup baik karena dapat dilihat pada tabel di atas.

Sementara rata-rata variabel pertumbuhan ekonomi (Y) pada kurun waktu yang sama yaitu tahun 1995-2012 adalah sebesar 3.3689, dengan standar deviasi .82913, ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Selatan terus mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Hal ini dibuktikan pada setiap tahunnya sektor PDRB di Kabupaten Aceh Selatan menunjukkan peningkatan atau jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh daerah mengalami perubahan setiap tahunnya.

4.4.1. Analisis Koefisien Kolerasi dan Determinasi

Hal ini dapat di lihat pada tabel 4 di bawah ini dimana dapat dipergunakan dengan tujuan dan untuk mengetahui tingkat keeratan sehingga hubungan kedua variabel tersebut ada keterkaitan satu sama lain dengan demikian dapat di lihat seberapa kuat atau keeratan antara kedua variabel tersebut antara derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Selatan. Sehingga dapat lebih jelas seberapa pengaruh derajat desentralisasi tersebut sejak dari tahun 1995-2012.

Tabel 4
Koefisien Kolerasi dan Koefisien Determinasi

No	Variabel	Desentralisasi Fiskal	Pertumbuhan Ekonomi
1.	Pearson Correlation		
	a. Desentralisasi	1.000	.564
	b. Pertumbuhan Ekonomi	.564	1.000
2.	Model		
	a. Koefisien Kolerasi (R)	.731	
	b. Koefisien Determinasi (R ₂)	.535	

Sumber: Data Penelitian (Data diolah tahun 2013)

Pada Tabel 4 di atas dapat dilihat dimana koefisien kolerasi derajat desentralisasi fiskal (X) yang diperoleh adalah $R = 0.731$ secara positif menjelaskan terdapat hubungan yang kuat antara derajat desentralisasi fiskal (X) dan pertumbuhan ekonomi (Y) dengan keeratan hubungan 73.1 persen terhadap variabel pertumbuhan ekonomi di kabupaten Aceh Selatan, apabila derajat desentralisasi fiskal mengalami peningkatan yang dilihat dari *share* pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah, maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat.

Berdasarkan hasil analisa pengaruh derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di peroleh di peroleh nilai koefesien determinasi (R^2) sebesar 0.535 nilai ini menunjukkan bahwa variabel derajat desentralisasi fiskal sebesar 53.5 persen dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kabupaten Aceh Selatan. Sedangkan sisanya sebesar 46.5 persen itu di pengaruhi variabel lain, yaitu jumlah Tenaga kerja dan pengangguran. Jelas bahwa pengaruh derajat desentralisasi fiskal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah di kabupaten Aceh Selatan.

4.4.2. Uji Regresi Linier Sederhana

Tabel 5
Regresi Linier Sederhana dan Uji Persial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.301	.284		8.096	.000
DF	.404	.094	.731	4.290	.001

Sumber: Hasil Penelitian (Data diolah tahun 2013)

Tabel 5 memperlihatkan persamaan regresi linier sederhana akhir estimasi adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b X \dots\dots\dots (1)$$

$$Y = 2.301 + 0.404X \dots\dots\dots (2)$$

Persamaan regresi linier sederhana diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta

Berdasarkan persamaan tersebut bahwa nilai konstanta sebesar 2,301. artinya nilai konstanta dapat dinyatakan bahwa apabila variabel derajat desentralisasi fiskal sama dengan nol maka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Selatan naik rata-rata sebesar 2,301 persen.

2. Koefesien Regresi b

Berdasarkan persamaan tersebut nilai b sebesar 0,404 dapat di jabarkan bahwa jika derajat desentralisasi fiskal meningkat 1 persen maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Selatan akan meningkat sebesar 0,404 persen.

4.4.3. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji t di gunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara variabel bebas yaitu desentralisasi fiskal (X) dan variabel terikat pertumbuhan ekonomi (Y) secara individual dengan tingkat kepercayaan (*level of confidence 95 persen*) yaitu :

Berdasarkan tabel diatas nilai nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4.290 > 1.746$) H_0 ditolak H_1 maka secara parsial derajat desentralisasi fiskal berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Aceh Selatan.

4.5. Pembahasan Hasil Penelitian

Kabupaten Aceh Selatan selama pelaksanaan desentralisasi fiskal masih ada ketergantungan pada penerimaan pemerintah pusat. Ketergantungan ini dapat dilihat dari rendahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber Pendapatan Asli

Daerah (PAD), dan terbatasnya potensi sumber daya lokal yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Hasil analisa data dapat di sajikan bahwa variabel derajat desentralisasi fiskal mempunyai hubungan yang erat terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Selatan sebesar 5.64 persen. Artinya derajat desentralisasi fiskal akan memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dibuktikan secara empiris bahwa peningkatan derajat desentralisasi fiskal yang di hitung dari share pendapatan asli daerah dan total pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Aceh Selatan selama duabelas tahun terakhir.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Aceh Selatan maka dapat di simpulkan bahwa :

- a. Rata-rata derajat desentralisasi fiskal dalam kurun waktu 1995-2012 di Kabupaten Aceh Selatan yaitu sebesar 2.64 persen. Sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu yang sama sebesar 3.36 persen dengan jumlah observasi 18 tahun
- b. Koefisien kolerasi derajat desentralisasi fiskal di peroleh 0.731 secara positif menjelaskan terdapat hubungan yang kuat antara derajat desentralisasi fiskal (X) dan pertumbuhan ekonomi (Y) dengan keeratan hubungan 73.1 persen. sedangkan koefisiensi determinasi (r^2) menunjukkan bahwa variabel derajat desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Selatan sebesar 0.535 persen sedangkan sisanya 46.5 persen dipengaruhi oleh variabel lainnya di luar model penelitian ini.
- c. Pembuktian yang dilakukan dengan menggunakan uji t diperoleh bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4.290 > 1.746$) H_0 ditolak H_1 maka secara parsial derajat desentralisasi fiskal berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Aceh Selatan.
- d. Derajat Desentralisasi Fiskal (DF) sudah cukup baik di Aceh selatan.

5.2. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis akan mengajukan saran untuk pihak-pihak yang terkait sehingga dapat mencerminkan keadaan dan pembangunan Kabupaten Aceh Selatan, adapun saran-saran yang adalah :

- a. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan harus memaksimalkan peranan Desentralisasi fiskal untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya. Menekan derajat desentralisasi agar dapat memberikan manfaat terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan demikian pemerintah daerah dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Pemerintah daerah seharusnya dapat meningkatkan sumber-sumber penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan dengan penerimaan yang berasal dari transfer pusat. Pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan seoptimal mungkin untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber lokal.
- c. Studi ini terbatas pada Kabupaten Aceh Selatan untuk studi yang lebih luas mengenai pengaruh derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi disarankan supaya berbasis provinsi agar dapat memberikan hasil yang lebih riil.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo.2010.*Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*.
Grahailmu. Yogyakarta
- Abrar, Muhammad.2010. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Pengaruh pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh*. Fakultas Ekonomi Universita Syah Kuala.
- Fokusmedia, Tim Redaksi.2006. *Undang-Undang otonomi Daerah*. Fokusmedia. Bandung.
- _____. 2007. *Undang-Undang Ketentua Umum dan Tata Cara Perpajakan (KPU)*. Fokusmedia. Bandung.
- Gujarati, N Damodar. 2003. *Basic Econometrics*. Fourth Edition. The McGraw-Hill Companies
- Hasan, Iqbal.2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. PT.Ghalia Indonesia. Bogor.
- Hidayat. Afri. 2009. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Posisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara*. Universitas Sumatera Utara. Medan
- Jhingan, M.L.2007. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Penerjemah D. Guritno.Edisi 1. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Kaloh, J.2002. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan antar Wilayah dalam Buku Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Erlangga
- Nachrowi dan Usman. 2006.*Pendekatan Populer dan Praktris Ekonometrika*, Fakultas Ekonomi Indonesia. Bogor
- Pudyatmoko, Sri. 2004. *Pengantar Hukum Pajak*. Andi. Yogyakarta.
- Permendagri Nomor 26 tahun 2006
- Sukirno, Sadono. 2004. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Edisi-3 PT Grafindo Persada. Jakarta.
- _____.Sadono. 2006.*Ekonomi Pembangunan, Proses Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Edisi-2. Jakarta

- Saragih, Junawi Hartasi. 2009. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi (Studi Komparadis: Kabupaten Tapanuli selatan dan Kabupaten Langkat)*. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara. Medan
- Suparmoka, M, 2002. *Ekonomi Publik Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta.
- Siagan, Altito R. 2010. “*Damapak Desentralisasi Fiskal 1999-2004*”. Dalam Abimayu, Anggito dan Megantara, Andie. *Era Kebijakan Fiskal; Pemikiran, Konsep dan Implementasi*. Penerbit Kompas. Jakarta.
- Siddik, Machfud. 2002. *Dana Alokasi Umum, Konsep Hambatan , dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Penerbit Kompas. Jakarta
- Tarigan, Robinson. 2005. *Ekonomi Regional : Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah*. Edisi Revisi. Bumi Aksara, Jakarta.
- _____. 2007. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Edisi Revisi. PT Bumi Aksara. Jakarta
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 “*Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai Penambah Nilai Kekayaan bersih dalam Periode Tahun Bersangkutan*”.
- _____. No. 33 Tahun 2004 Pasal 6 Tentang “*Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*”.
- _____. No 28 Tahun 2009 Pasal 2 Tentang “*Pajak Daerah*”.
- _____. No 28 Tahun 2009 Pasal 108 Tentang “*Retribusi Daerah*”.
- _____. No 11 Tahun 2006 Tentang “*Pemerintah Aceh yang didalamnya secara khusus disebutkan tentang Zakat dan Baitul Mal.*”.
- _____. No 33 Tahun 2009 Pasal 7 Tentang “*Pendapatsn Asli Daerah dalam upaya meningkatkan PAD*”.
- Wahyuningtyas, Agustina Endang. 2010. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Defisit Anggaran terhadap Investasi di Indonesia*. Skripsi Universitas diponogoro. Semarang.

Lampiran 1 : Tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal di Kabupataen Aceh Selatan

No	Tahun	PAD (Rupiah)	TPD (Rupiah)	DF (Persen)
1.	1995	2.676.908.965	221.844.572.025	1,21
2.	1996	2.895.789.479	245.893.369.693	1,18
3.	1997	2.915.275.901	256.355.123.433	1,14
4.	1998	2.983.110.718	264.852.327.377	1,13
5.	1999	3.726.987.957	289.357.128.327	1,29
6.	2000	3.972.562.337	295.357.681.913	1,35
7.	2001	4.229.622.885	259.520.481.511	1.63
8.	2002	5.328.244.215	281.510.900.212	1.89
9	2003	6.329.682.886	318.263.623.492	1.99
10.	2004	5.832.431.311	351.623.725.492	1.66
11.	2005	5.021.948.817	223.605.077.400	2.24
12.	2006	9.978.254.999	379.771.556.409	2.63
13.	2007	13.327.987.773	429.931.769.661	2.70
14.	2008	15.000.000.000	431.051.127.900	3.48
15.	2009	19.391.232.990	438.587.749.411	4.42
16.	2010	23.280.488.630	482.228.344.058	4.83
17.	2011	35.061.950.187	574.572.890.344	6.10
18.	2012	30.000.000.000	692.988.629.530	4.33

Sumber:DPKAD Aceh Selatan (Data diolah tahun 2013)

$$DF_{1995} = \frac{2.676.908.965}{221.844.572.025} \times 100 \%$$

$$= 1,21$$

$$DF_{1996} = \frac{2.895.789.479}{245.893.369.693} \times 100 \%$$

$$= 1,18$$

$$DF_{1997} = \frac{2.915.275.901}{256.355.123.433} \times 100 \%$$

$$= 1,14$$

$$\begin{aligned} DF_{1998} &= \frac{2.983.110.718}{264.852.327.377} \times 100 \% \\ &= 1,13 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} DF_{1999} &= \frac{3.726.987.957}{289.357.128.327} \times 100 \% \\ &= 1,29 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} DF_{2000} &= \frac{3.972.562.337}{295.357.681.913} \times 100 \% \\ &= 1,35 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} DF_{2002} &= \frac{5.328.244.215}{281.510.900.212} \times 100 \% \\ &= 1,89 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} DF_{2003} &= \frac{6.329.682.886}{318.263.623.492} \times 100 \% \\ &= 1,99 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} DF_{2004} &= \frac{5.832.431.311}{351.623.725.492} \times 100 \% \\ &= 1,66 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} DF_{2005} &= \frac{5.021.948.817}{223.605.077.400} \times 100 \% \\ &= 2,24 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} DF_{2006} &= \frac{9.978.254.999}{379.771.556.409} \times 100 \% \\ &= 2.63 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} DF_{2007} &= \frac{13.327.987.773}{429.931.769.661} \times 100 \% \\ &= 2.70 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} DF_{2008} &= \frac{15.000.000.000}{431.051.127.900} \times 100 \% \\ &= 3.48 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} DF_{2009} &= \frac{19.391.232.990}{438.587.749.411} \times 100 \% \\ &= 3.42 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} DF_{2010} &= \frac{17.506.599.589}{482.228.344.058} \times 100 \% \\ &= 4.83 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} DF_{2011} &= \frac{35.061.950.187}{574.572.890.344} \times 100 \% \\ &= 6.10 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} DF_{2012} &= \frac{30.000.000.000}{692.988.629.530} \times 100 \% \\ &= 4.33 \end{aligned}$$

Lampiran 2: Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupataen Aceh Selatan

No	Tahun	PDRB (Jutaan Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)
1.	1995	1.513.656.80	2.10
2.	1996	1.643.705.50	2.30
3.	1997	1.762.987.59	2.35
4.	1998	1.983.011.71	2.55
5.	1999	1.217.275.90	2.60
6.	2000	1.415.381.44	3.00
7.	2001	1.092.287,92	3.02
8.	2002	1.129.691,39	3.72
9.	2003	1.112.779,53	3.92
10.	2004	1.319.836,13	3.55
11.	2005	1.513.656,80	4.39
12.	2006	1.643.705,50	3.42
13.	2007	1.762.987,59	2.73
14.	2008	1.983.011,71	3.63
15.	2009	2.217.275,90	3.81
16.	2010	2.415.381,44	4.19
17.	2011	2.709.900,06	4.47
18.	2012	2.112.831,08	4.89

Sumber: BAPPEDA Aceh Selatan (Data diolah tahun 2013)

Lampiran 3 : Data input Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Kabupaten Aceh Selatan

No	Tahun	DF	PE
1.	1995	1,21	2.10
2.	1996	1,18	2.30
3.	1997	1,14	2.35
4.	1998	1,13	2.55
5.	1999	1,29	2.60
6.	2000	1,35	3.00
7.	2011	1.63	3.02
8.	2002	1.89	3.72
9.	2003	1.99	3.92
10.	2004	1.66	3.55
11.	2005	2.24	4.39
12.	2006	2.63	3.42
13.	2007	2.70	2.73
14.	2008	3.48	3.63
15.	2009	4.42	3.81
16.	2010	4.83	4.19
17.	2011	6.10	4.47
18.	2012	4.33	4.89

Sumber: Data Penelitian (Data diolah tahun 2013)

Lampiran 4 : Hasil Regresi

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
PE	3.3689	.82913	18
DF	2.6417	1.50058	18

Correlations

		PE	DF
Pearson Correlation	PE	1.000	.564
	DF	.564	1.000
Sig. (1-tailed)	PE	.	.028
	DF	.028	.
N	PE	12	12
	DF	12	12

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	DF ^a		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: PE

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.731 ^a	.535	.506	.58281	.535	18,407	1	16	.001

a. Predictors: (Constant), DF

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6,252	1	6,252	18,407	,001 ^a
	Residual	5,435	16	,340		
	Total	11,687	17			

a. Predictors: (Constant), DF

b. Dependent Variable: PE

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95,0% Confidence Interval for B	
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound
1 (Constant)	2,301	,284		8,096	,000	1,699	2,904
DF	,404	,094	,731	4,290	,001	,204	,604

Coefficient Correlations^a

Model		DF
1	Correlations	DF
	Covariances	DF

a. Dependent Variable: PE

Casewise Diagnostics^a

Case Number	Std. Residual	PE	Predicted Value	Residual
1	-1,184	2,10	2,7903	-,69030
2	-,820	2,30	2,7782	-,47817
3	-,707	2,35	2,7620	-,41201
4	-,357	2,55	2,7580	-,20796
5	-,382	2,60	2,8226	-,22263
6	,069	3,00	2,9600	,03997
7	-,077	3,02	3,0651	-,04511
8	1,054	3,72	3,1055	,61448
9	1,626	3,92	2,9722	,94784
10	,589	3,55	3,2066	,34344
11	1,760	4,39	3,3642	1,02583
12	,047	3,42	3,3925	,02754
13	-1,830	2,73	3,7966	-1,06660
14	-,133	3,63	3,7077	-,07769
15	-,476	3,81	4,0876	-,27758
16	-,109	4,19	4,2533	-,06328
17	-,509	4,47	4,7665	-,29654
18	1,439	4,89	4,0512	,83879

a. Dependent Variable: PE

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	2,7580	4,7665	3,3689	,60644	18
Std. Predicted Value	-1,007	2,305	,000	1,000	18
Standard Error of Predicted Value	,137	,354	,188	,051	18
Adjusted Predicted Value	2,7851	4,9392	3,3828	,62433	18
Residual	-1,06660	1,02583	,00000	,56540	18
Std. Residual	-1,830	1,760	,000	,970	18
Stud. Residual	-1,913	1,811	-,011	1,020	18
Deleted Residual	-1,16545	1,08617	-,01390	,62588	18
Stud. Deleted Residual	-2,109	1,967	,000	1,076	18
Mahal. Distance	,000	5,311	,944	1,225	18
Cook's Distance	,000	,178	,054	,061	18
Centered Leverage Value	,000	,312	,056	,072	18

a. Dependent Variable: PE

Histogram

Dependent Variable: PE

